

EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI PROGRAM e-KTP

Ronny Indra Kurniawan dan Sujianto

FISIP Universitas Riau, Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Panam, Pekanbaru 28293

Abstract: Effectiveness of the Implementation of e-KTP Program. This study aims to analyze the processes and factors that influence the success of the effective implementation of e-ID card program in the Office of Population and Civil Registration Pekanbaru. This research uses descriptive qualitative method. The types of data used in this study is secondary data include official documents, books, and research results. Data collection methods used were interviews, observation, and study documentation. The results indicate the implementation of e-ID card program has been effective. Pekanbaru City District Government Bukitraya able berperanan as good implementer.

Abstrak: Efektivitas Implementasi Program e-KTP. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses dan faktor yang mempengaruhi keberhasilan efektivitas implementasi program e-KTP di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang meliputi dokumen-dokumen resmi, buku-buku, dan hasil-hasil penelitian. Metode pengumpulan data yang dipakai adalah wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan proses pelaksanaan program e-KTP sudah efektif. Pemerintah Kecamatan Bukitraya Kota Pekanbaru mampu berperanan sebagai implementator yang baik

.Kata Kunci: Efektivitas, implementasi, dan program e-KTP.

PENDAHULUAN

Tertib dan berdisiplin dalam menjalankan administrasi kependudukan dirasakan perlu, dalam mengurangi jurang kecurangan dalam pengandaan identitas pribadi warga negara yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dijelaskan bahwa: “penduduk hanya diperbolehkan memiliki 1 (satu) KTP yang tercantum Nomor Induk Kependudukan (NIK). NIK merupakan identitas tunggal setiap penduduk dan berlaku seumur hidup”.

Apa yang terjadi belakangan ini, permasalahan yang krusial tersebut bermunculan diberbagai daerah dengan motif-motif yang berbeda, seperti hal misalnya tindakan kriminal, pencarian kerja dan sebagai alasan politik. Dimana identitas pribadi atau KTP berlaku ganda dan setiap orang mempunyai data yang sama diwilayah kawasan yang berbeda. Oleh karena itu, didalam menjalankan program pemerintah yang tertib dan berdisiplin didalam menjalankan administrasi pemerintah berupaya mengalihkan

produk hasilan KTP yang dikeluarkan oleh kecamatan didaerah menjadi produk elektronik KTP tersebut menjadi tertib database yang terpusat. Dimana sumber data yang diberikan oleh daerah nantinya akan tersimpan melalui database terpusat oleh kementerian dalam negeri.

Kartu Tanda Penduduk elektronik atau *electronic-KTP (e-KTP)* adalah Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dibuat secara elektronik, dalam artian baik dari segi fisik maupun penggunaannya berfungsi secara komputerisasi. Program *e-KTP* diluncurkan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia pada bulan Februari 2011 dimana pelaksanaannya terbagi dalam dua tahap. Tahap pertama dimulai pada tahun 2011 dan berakhir pada 30 April 2012 yang mencakup 67 juta penduduk di 2348 kecamatan dan 197 kabupaten/kota. Sedangkan tahap kedua mencakup 105 juta penduduk yang tersebar di 300 kabupaten/kota lainnya di Indonesia. Secara keseluruhan, pada akhir 2012, ditargetkan setidaknya 172 juta penduduk sudah memiliki *e-KTP*.

Masalah implementasi *e-KTP* yang ada di kecamatan se-Pekanbaru pada bulan Desember

2012 tidak sesuai target dan merata. Penyerahan e-KTP yang belum berjalan maksimal berada di kecamatan terbesar di Pekanbaru, dengan asumsi yang belum melakukan perekaman data sebanyak 22,695 orang dan untuk kecamatan yang terendah berada di Kecamatan Sail dengan asumsi sebanyak 2,045.

Perkembangan kebijakan publik didunia ketiga telah mengimplemintasikan corak kebijakan publik yang mengarah kepada kesejahteraan rakyat. Keperluan yang mendesak di Indonesia akhir-akhir ini harus melibatkan *stakeholder* internal maupu eksternal, yaitu pemerintah dan institusi yang terlibat didalam pembangunan dapat melakukan penambah baikan terhadap suatu kebijakan publik yang berkualitas dimana dilakukan secara profesional bagi seluruh kalangan lapisan masyarakat.

Kebijakan publik merupakan sasaran yang utama bagi pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat yang partisipatif dan inspiratif dalam segala bentuk pembangunan. Secara konsepsional kebijakan publik adalah merupakan kebijakan-kebijakan yang dikembangkan oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah, yang diperlukan untuk kepentingan seluruh masyarakat (Hilary, 2003). Melalui suatu proses pengelolaan nilai-nilai secara sah kepada seluruh anggota masyarakat (Easton, 2006). Secara lebih khusus Kaplan (2003) menyatakan bahwa kebijakan suatu pekerjaan untuk mencapai suatu tujuan, nilai-nilai dan praktek yang lebih terarah.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses dan faktor yang mempengaruhi keberhasilan efektivitas implementasi program e-KTP di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru.

METODE

Sesuai dengan maksud dan tujuan penelitian maka secara teoritis tipe penelitian ini termasuk kedalam penelitian sosial yang merupakan penelitian deskriptif atau "*descrip teori social research*" dengan analisa kualitatif. Penelitian ini akan menggambarkan dan menganalisis data yang dihimpun dari informan melalui wawancara

mendalam, observasi di lapangan dan dari dokumentasi yang tersedia menggunakan metode kualitatif deskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Pemerintah Kecamatan Bukitraya Kota Pekanbaru mempunyai peranan penting dalam mensukseskan e-KTP yang sesuai program yang telah dicanangkan pemerintah pusat Republik Indonesia, pada penerapannya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Pemerintah Kecamatan Bukitraya Kota Pekanbaru diharapkan mampu memaksimalkan potensi yang ada dan bekerja sama dengan baik dalam sosialisasi e-KTP di Kecamatan Bukitraya Kota Pekanbaru.

Implementasi merupakan suatu cara dalam melaksanakan tertib administrasi sesuai dengan ketentuan koridor Administrasi Kependudukan di tingkat penyelenggara dan instansi pelaksana sebagai suatu kesatuan. e-KTP merupakan suatu sistem baru yang diupayakan penerapannya oleh Pemerintah kepada masyarakat. Pemerintah menunjuk Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil khususnya Kota Pekanbaru sebagai penanggung jawab dalam menjalankan pembuatan penyelenggaraan e-KTP di Kota Pekanbaru. Pengenalan program impelentasi informasi baru ini yaitu mengenai e-KTP di masyarakat melibatkan beberapa perangkat pemerintah dari kecamatan, kelurahan, Rukun Warga (RW) hingga Rukun Tetangga (RT) sebagai pemimpin suatu masyarakat yang tinggal di suatu daerah yang nantinya akan memberikan informasi sosialisasi e-KTP ini kepada masyarakat Kecamatan Bukitraya Kota Pekanbaru yang dimana bertujuan untuk dapat bekerja sama dalam proses sosialisasi e-KTP.

Sebelum melakukan Impelementasi tentulah dulu harus dilakukan sosialisasi komunikasi melalui penyebaran informasi atau pesan. Dimana hal ini dilakukan untuk menyadarkan masyarakat bahwa program e-KTP ini bermanfaat bagi hidup berbangsa dan bernegara. Dalam hal ini pemerintah Kecamatan Bukitraya Kota Pekanbaru bertindak sebagai penyampai/penyambung tangan pemerintah pusat, dalam pelaksanaan

sosialisasi e-KTP di Kecamatan Bukitraya Kota Pekanbaru, yang menjadi tujuannya adalah bagaimana sosialisasi program e-KTP yang dilakukan oleh pihak Kecamatan Bukitraya Kota Pekanbaru. Upaya sosialisasi e-KTP di Kecamatan Bukitraya Kota Pekanbaru oleh pihak Kecamatan Bukitraya telah melakukan forum diskusi tentang program sosialisasi e-KTP dengan Lurah, Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT) yang akan dilakukan sosialisasi e-KTP terhadap masyarakat Kecamatan Bukitraya Kota Pekanbaru. Dan dari hasil diskusi tersebut, pihak Kecamatan Bukitraya Kota Pekanbaru mengambil beberapa langkah untuk memaksimalkan program sosialisasi perekaman e-KTP.

Beberapa provinsi di Indonesia sudah mulai menerapkan sistem e-KTP. Salah satunya adalah Provinsi Riau yang beribukotakan Pekanbaru. Penyelenggaraan e-KTP di Pekanbaru sudah diterapkan sejak 10 November tahun 2011 lalu. Pemerintah Pekanbaru menyediakan peralatan-peralatan yang diperlukan untuk proses penerapan e-KTP di setiap Kecamatan yang ada di Kota Pekanbaru, seperti Iris Scan, Kamera EOS 100D Canon, Tripod, Monitor LCD (HP), Hardisk Eksternal 1 TB, Speaker Sonic Gear, Kain Latar dan lain sebagainya.

Proses sosialisasi e-KTP di Kecamatan Bukitraya Kota Pekanbaru tidak sepenuhnya berjalan dengan lancar. Dalam penerapannya ditemukan kendala-kendala yang menjadi penghambat kelancaran proses sosialisasi e-KTP di Kecamatan Bukitraya Kota Pekanbaru. Kendala-kendala yang terjadi dapat ditemui dari pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dari pihak Kecamatan Bukitraya Kota Pekanbaru, hingga Kendala yang ditemui dari pihak masyarakat Kecamatan Bukitraya Kota Pekanbaru itu sendiri. Sehingga kendala-kendala yang ada tersebut secara langsung mempengaruhi tidak lancar jalannya sosialisasi e-KTP di Kecamatan Bukitraya Kota Pekanbaru.

Berbagai usaha telah dilakukan, dalam menjalankan sosialisasi e-KTP oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru sebagai suatu lembaga pemerintah yang

memiliki tanggung jawab dalam pendataan penduduk. Dari hasil observasi yang dilakukan peneliti membuktikan bahwa benar yang dikatakan oleh Ibu Hj. Halmayati, SE, MM selaku Kabid Pendaftaran Penduduk Kota Pekanbaru, kurangnya kesadaran dari masyarakat Kecamatan Bukitraya Kota Pekanbaru itu sendiri untuk segera melakukan proses perekaman e-KTP di UPTD kantor Camat yang telah ditunjuk sebagai tempat penyelenggara. Situasi yang menunda-nunda dari masyarakat yang merupakan wajib e-KTP itulah yang membuat proses perekaman e-KTP yang dilakukannya berlangsung sangat lama dan memakan waktu.

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan penulis di Kecamatan Bukitraya Kota Pekanbaru, terdapat kendala yang ditemui pihak masyarakat kecamatan Kota Pekanbaru bahwa banyak masyarakat yang belum paham dan mengerti akan keberadaan e-KTP. Keterbatasan pengetahuan masyarakat mengenai perkembangan teknologi merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi lambatnya penerapan e-KTP di suatu daerah, sehingga masyarakat Kecamatan Bukitraya Kota Pekanbaru merasa dibingungkan dengan munculnya e-KTP. Beberapa masyarakat mengetahui adanya pemberitaan tentang perubahan e-KTP di beberapa media serta penyuluhan sosialisasi e-KTP yang dilakukan oleh pihak Kecamatan Bukitraya Kota Pekanbaru, tetapi sebagian besar dari masyarakat tersebut belum mengerti akan kegunaan e-KTP itu sendiri. Berbagai informasi mengenai proses berlangsungnya penerapan e-KTP di Kecamatan Bukitraya Kota Pekanbaru. Penyebab kendala masyarakat menunda-nunda dalam pembuatan e-KTP ini karena masih belum pahamnya akan fungsi dan tujuan e-KTP tersebut secara jelas. Banyak di antara masyarakat Kecamatan Bukitraya Kota Pekanbaru yang menunda-nunda untuk melaksanakan perekaman e-KTP di Kecamatan Bukitraya Kota Pekanbaru.

SIMPULAN

Proses pelaksanaan program e-KTP oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan

Kecamatan Bukitraya Kota Pekanbaru sudah efektif. Pemerintah Kecamatan Bukitraya Kota Pekanbaru mampu berperan sebagai implementator yang baik. Dimana mampu bekerjasama dengan jajaran terendah seperti seperti Lurah, RW, RT bekerja sama dalam hal melaksanakan kebijakan program e-KTP. Hal itu terbukti dengan sudah berhasilnya Kecamatan Bukitraya Kota Pekanbaru melakukan perekaman dengan jumlah, 27,670 orang di tahun 2012. Walaupun dari segi hasil persentasi Kecamatan Bukitraya Kota Pekanbaru masih tertinggal dari kecamatan lain yang ada di Pekanbaru dalam hal sosialisasi untuk menyerahkan e-KTP. Hal tersebut dikarenakan jumlah warga di Kecamatan Bukitraya terbanyak dan dengan daerah jangkauan yang besar.

DAFTAR RUJUKAN

- Bungin, Burhan. 2007. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Djohan, Djohermansyah. 2003. *Kebijakan Otonomi Daerah*. Jakarta: Yarif Watampone.
- Dwijowijoto, Riant Nugroho, 2007. *Analisis Kebijakan*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Dunn, William N., 1998. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Handyaningrat, Soemawarto. 1993. *Administrasi dalam Pembangunan Nasional*. Jakarta: Gunung Agung.
- Hasanudin, Islamy. 1997. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.